



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 639 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENGELOLA HAK AKSES PEMANFAATAN NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA
PENDUDUK ELEKTRONIK PADA APLIKASI PELAYANAN ADMINISTRASI
KELURAHAN TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan mendukung proses pelayanan publik di kelurahan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang lebih cepat, aman, efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pengelola Hak Akses Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik pada Aplikasi Pelayanan Administrasi Kelurahan Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7), Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 35 Tahun 2010 tentang Master Plan e-Government Tahun 2010-2029 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 35);
11. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aplikasi Pelayanan Administrasi Kelurahan Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 139).

Memperhatikan : Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Nomor : 470/01/PKS/DISDUKCAPIL/2018 Nomor : 100/05/PKS/BAGPEM/IX/2018 Tentang Pemanfaatan Data Kependudukan Yang Berbasis Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik Dalam Lingkup Tugas Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Hak Akses Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pada Aplikasi Pelayanan Administrasi Kelurahan Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a. mengkaji pemberian fasilitas hak akses sesuai kebutuhan;
- b. membuat laporan berkala pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik per semester;
- c. menjaga kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diakses;
- d. menjamin pemanfaatan data yang diterima dan diakses hanya untuk kepentingan aplikasi Pelayanan Administrasi Kelurahan Terintegrasi (PALUI);
- e. menjamin tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 21 September 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 639 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM PENGELOLA HAK AKSES PEMANFAATAN NOMOR INDUK
 KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA
 PENDUDUK ELEKTRONIK PADA APLIKASI PELAYANAN
 ADMINISTRASI KELURAHAN TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PENGELOLA HAK AKSES PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK
 ELEKTRONIK PADA APLIKASI PELAYANAN ADMINISTRASI KELURAHAN TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	AHMAD FAISAL ANSHORY, S.STP	Kasubbag Administrasi Kewilayahan	Admin Bagian Pemerintahan	
2	SURTINIWATI, SE	Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kel. Kuin Selatan	Admin pada Kelurahan	
3	MULYATNO HADI PURWATMO, S. Sos	Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kel. Telaga Biru	Admin pada Kelurahan	
4	GUSTI BURHANUDDIN	Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kel. Kuin Cerucuk	Admin pada Kelurahan	
5	Hj. SRI SUARIANI	Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kel. Pelambuan	Admin pada Kelurahan	
6	MEGAWATI	Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kel. Teluk Tiram	Admin pada Kelurahan	
7	RIANA SAFITRI, S. Sos	Kasi Ekonomi Pembangunan (Ekobang) Kel. Belitung Utara	Admin pada Kelurahan	
8	Hj. FATMASARI	Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kel. Basirih	Admin pada Kelurahan	
9	MASWITA ISKANDAR	Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kel. Belitung Selatan	Admin pada Kelurahan	
10	GT. YUSNA SYAHBANA, SE	Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kel. Telawang	Admin pada Kelurahan	
11	DEDY SADIKIN, S. Mn	Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kel. Pekauman	Admin pada Kelurahan	
12	IDAWATI	Kasi Ekonomi Pembangunan (Ekobang) Kel. Tanjung Pagar	Admin pada Kelurahan	
13	THAIBAH, SE	Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kel. Kelayan Selatan	Admin pada Kelurahan	
14	LAILA NORHAYATI	Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kel. Kelayan Tengah	Admin pada Kelurahan	
15	Hj. NOOR HANIAH	Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kel. Basirih Selatan	Admin pada Kelurahan	
16	Hj. HENNY RUPAIDA	Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kel. Kelayan Dalam	Admin pada Kelurahan	

1	2	3	4	5
17	PUSPITASARI	Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kel. Kelayan Barat	Admin pada Kelurahan	
18	SA'DIAH	Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kel. Kelayan Timur	Admin pada Kelurahan	
19	SRI HARTATI	Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kel. Pemurus Baru	Admin pada Kelurahan	
20	GUSTI WAHIDAH	Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kel. Pemurus Dalam	Admin pada Kelurahan	
21	NORMANSYAH, S.AP	Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kel. Mantuil	Admin pada Kelurahan	
22	ERVIANITA, A. Md	Kasi Ekonomi Pembangunan (Ekobang) Kel. Murung Raya	Admin pada Kelurahan	
23	EMELDA DWI SHANTY OKTAVIANI, A. Md	Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kel. Melayu	Admin pada Kelurahan	
24	TRI LUSIANI, A. Md	Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kel. Sungai Baru	Admin pada Kelurahan	
25	NURUL HANDAYANI, SH	Kasi Ekonomi Pembangunan (Ekobang) Kel. Gadang	Admin pada Kelurahan	
26	SITI HASANAH	Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kel. Seberang Mesjid	Admin pada Kelurahan	
27	RUSLIANA RIANI, SE	Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kel. Kelayan Luar	Admin pada Kelurahan	
28	Hj. NOORNAZLY, SH	Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kel. Antasan Besar	Admin pada Kelurahan	
29	Hj. NORANI	Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kel. Mawar	Admin pada Kelurahan	
30	MUHAMMAD KARLIN, S.Pd	Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kel. Pekapuran Laut	Admin pada Kelurahan	
31	ARNILY	Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kel. Kertak Baru Ilir	Admin pada Kelurahan	
32	Hj. GT. IQRA NURSAMAWATI, SE	Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kel. Pasar Lama	Admin pada Kelurahan	
33	KHAIRUNNISA, SKM	Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kel. Kertak Baru Ulu	Admin pada Kelurahan	
34	NURUL ANNIDA, A. Md	Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kel. Teluk Dalam	Admin pada Kelurahan	
35	RAHMADANNOOR	Kasi Ekonomi Pembangunan (Ekobang) Kel. Sungai Lulut	Admin pada Kelurahan	
36	GUSTI MARIANI	Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kel, Banua Anyar	Admin pada Kelurahan	
37	MUHAMMAD FAISAL RAHMADANI, A. Md	Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kel. Kuripan	Admin pada Kelurahan	
38	ARIYANIS	Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kel. Pengambangan	Admin pada Kelurahan	
39	KHAIRUNNISA	Kasi Ekonomi Pembangunan (Ekobang) Kel. Sungai Bilu	Admin pada Kelurahan	
40	BURHANNOOR, SE	Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kel. Kebun Bunga	Admin pada Kelurahan	
41	NORMASITA, S.AP	Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kel. Pemurus Luar	Admin pada Kelurahan	
42	IDA RAKHMAWATI, SH	Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kel. Karang Mekar	Admin pada Kelurahan	
43	MARTINI, S.Sos., MA	Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kel. Pekapuran Raya	Admin pada Kelurahan	

1	2	3	4	5
44	SAUDAH, S. Sos	Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kel. Antasan Kecil Timur	Admin pada Kelurahan	
45	KHALISA AHYANI, SE	Kasi Ekonomi Pembangunan (Ekobang) Kel. Sungai Jingah	Admin pada Kelurahan	
46	ERNAWATI	Kasi Ekonomi Pembangunan (Ekobang) Kel. Alalak Tengah	Admin pada Kelurahan	
47	SITI WARDAH	Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kel. Surgi Mufti	Admin pada Kelurahan	
48	NURHALIFAH	Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kel. Sungai Miai	Admin pada Kelurahan	
49	HAIPPUDIN NOOR	Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kel. Kuin Utara	Admin pada Kelurahan	
50	SYAHLINA	Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kel. Alalak Selatan	Admin pada Kelurahan	
51	Dra. FAUZIAH	Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kel. Alalak Utara	Admin pada Kelurahan	
52	ZAIDA MARIANI	Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kel. Pangeran	Admin pada Kelurahan	
53	ISNANIAH, A.Ma	Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kel. Sungai Andai	Admin pada Kelurahan	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA